

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN
DENGAN ASAS ULTIMATUM REMEDIUM HUKUM PIDANA**

Oleh:

BAYU RAHMAN

NIM: 271 413 156

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Lisnawaty W. Badu, SH., MH
NIP. 196905292005012001

Pembimbing II



Suwitno Y. Imran, SH., MH.
NIP. 198306222009121004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Y. Imran, SH., MH.
NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN REVISI

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
DIHUBUNGAN DENGAN ASAS ULTIMATUM**

OLEH:

**BAYU RAHMAN
NIM: 271413156**

**Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Hari/ Tanggal : Selasa 10 September 2019
Pukul : 12:30 WITA**

Komisi Penguji:

**MOH. R. U. PULUHULAWA SH, M.HUM
NIP : 19701105 199703 1 001**

(.....)


**JULISA APRILIA KALUKU, SH.,MH
NIP: 19871804201607 2 001**

(.....)


**LISNAWATY W. BADU, SH.,MH
NIP: 1969052 9200501 2001**

(.....)


**SUWITNO YUTYE IMRAN, SH.,MH
NIP : 198306 2220091 21004**

(.....)


GORONTALO, 12 SEPTEMBER 2019

**MENGETAHUI,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



**Dr. DIAN EKAWATY ISMAIL, SH.,MH
NIP : 197412232003122011**

ABSTRAK

BAYU RAHMAN, 271413156, PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAANDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ULTIMATUM REMEDIUM. Di Bawah Bimbingan LISNAWATY W. BADU, SH.,MH (PEMBIMBING 1) Dan SUWITNO Y. IMRAN, SH.,MH (PEMBIMBING II) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2019

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Dalam Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan dengan Asas Ultimum Remedium Hukum Pidana.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan kasus (case aproach).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibagi dalam delik formil dan delik materi semuanya ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Bahwa Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan dengan Asas Ultimum Remedium, yang diatur dalam penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada intinya asas ultimum remeidum ini mengatur tentang penegakan hukum pidana lingkungan sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Namun asas ultimum remedium ini jika dikaitkan dengan prinsip umum dalam hukum pidana terdapat pertentangan, yaitu: Asas Legalitas. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, Artinya ketika ada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suatu tindak pidana, maka terhadap orang yang melanggar aturan tersebut berdasarkan asas legalitas harus dipidana, demikian pula dengan yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sehingga dalam hal ini asas ultimum remedium yang diatur dalam dalam penjelasan angka 6 kemudian diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat tidak mendasar untuk meniadakan pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena bertentangan dengan dasar peniadaan pidana dalam prinsip hukum pidana.

Kata Kunci: *Penerapan Sanksi Pidana; Lingkungan Hidup; Ultimum Remedium.*

ABSTRACT

Bayu Rahman, 271413156, The Implementation of Criminal Sanction in the Constitution No. 32 of 2009 about Management and Protection of Environmental in Association with Ultimatum Remedium Principle. The principal supervisor is Lisnawaty W. Badu, SH., MH., and the co-supervisor is Suwitno Y. Imran, SH., MH. Faculty of Law, State University of Gorontalo, 2019.

The research aim was to find out and analyze how the arrangement of criminal action in the Constitution Number 32 of 2009 about Protection and Management of Environmental is and to find out and analyze about how the implementation of Criminal Sanction in the Constitution No. 32 of 2009 about Management and Protection of Environmental in association with Ultimatum Remedium Principle of Criminal Sanction is.

The research was conducted by using juridical-normative research type, research which focused on discussing the implementation of principles or norms in the positive law by applying statute approach and case approach.

The research finding showed that the arrangement of criminal action in the Constitution Number 32 of 2009 about Protection and Management of Environmental was divided into a formal and material offense, which was all in 19 articles (Article 97 to 115). In addition, the implementation of management and protection of environmentally associated with Ultimatum Remedium principle which was managed in explanation number 6 of the Constitution Number 32 of 2009 about Protection and Management of Environmental. Basically, the ultimatum remedium principle arranges the law enforcement on administrative law which was considered failed. However, this principle contained conflict if being associated with general principle in the criminal act namely: Legality Principle. The legality principle was listed on Article 1 paragraph (1) of Criminal Code, which meant if there was legislation which manages certain criminal action, so that the perpetrator, based on the legality principle, must be convicted. In addition, one which was managed in Article 100 of the Constitution Number 32 of 2009 about management and protection of environmental, so that in this case, the ultimatum remedium principle which was managed in the explanation number 6 was then managed in Article 100 paragraph (2) of Act 32 of 2009 about Protection and Management of Environmental, was not reasonable to negate criminal in Article 100 paragraph (1) of the Constitution Number 32 of 2009 about Protection and Management of Environmental, due to it contradicted with basic of criminal negation in the criminal code principle.

Keywords: Implementation of Criminal Sanction; Environmental; Ultimatum Remedium

